Membangun Masyarakat Madani: Etika Politik Islam Al-Mawardi dalam konteks modern

Difa melani¹, Siti nurhalisa², Kurniati³

10200122074@uin-alauddin.ac.id¹, 10200122075@uin-alauddin.ac.id², Kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Dalam pemikirannya, Al-Mawardi menekankan pentingnya otoritas dan keadilan dalam pemerintahan. Dia memandang otoritas politik sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan dijalankan dengan keadilan. Pemikirannya juga menggarisbawahi pentingnya konsultasi (syura) dalam pengambilan keputusan politik dan keterlibatan umat dalam urusan publik. Meskipun tidak secara khusus membahas sistem perwakilan, pemikiran politik Al-Mawardi tetap relevan dalam konteks modern. Konsep-konsep seperti keadilan, partisipasi umat, dan tanggung jawab penguasa masih memiliki signifikansi dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Pemikiran Al-Mawardi juga menunjukkan bagaimana agama dan negara saling terkait, di mana nilai-nilai agama tercermin dalam pelaksanaan negara, termasuk nilai-nilai keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan kepemimpinan yang berkarisma. Abstrak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman singkat tentang pemikiran politik Imam Al-Mawardi dan relevansinya dalam konteks modern. Pemikiran Al-Mawardi menawarkan wawasan berharga tentang prinsip-prinsip pemerintahan Islam, keadilan, dan partisipasi umat, yang dapat menjadi landasan bagi pembahasan dan pemahaman lebih lanjut dalam membangun sistem politik yang baik dan adil dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: Pemikiran Al-Mawardi, Masyarakat Madani modern.

ABSTRACT

In his thought, Al-Mawardi emphasized the importance of authority and justice in government. He viewed political authority as a mandate that must be accounted for and carried out with justice. His thinking also underscores the importance of consultation (shura) in political decision-making and the involvement of the people in public affairs. Although not specifically addressing the representative system, Al-Mawardi's political thought remains relevant in a modern context. Concepts such as justice, people's participation and the responsibility of the ruler still have significance in building a just and equitable society. Al-Mawardi's thought also shows how religion and the state are intertwined, where religious values are reflected in the implementation of the state, including the values of justice, security, welfare, and charismatic leadership. This abstract aims to provide a brief understanding of Imam Al-Mawardi's political thought and its relevance in the modern context. Al-Mawardi's thought offers valuable insights into the principles of Islamic governance, justice, and people's participation, which can serve as a foundation for further discussion and understanding in building a good and just political system in contemporary Muslim societies.

Keywords: Al-Mawardi Thought, Modern Civil Society.

PENDAHULUAN

Riwayat Hidup Imam Al-Mawardi: Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhamrnad bin Habib al-Mawariial-Bashri (364 H/975 - 450 H/1058 M). Lahir di Basrah pada tahun 364 H. Ia adalah seorang ahli fiqh ahli hadis dan pemikir politik. Ia dikenal sebagai tokoh terkemuka Mazhab Syafi'i pada abad ke-10, pejabat tinggi pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan hidup di masa kemunduran Dinasti Abbasiyah. Al-Mawardi pada awalnya menuntut ilmu di Basrah. Ketika itu Basrah termasuk salah satu

pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan di wilayah Islam. Namun Al-Mawardi masih belum puas dengan ilmu yang dimilikinya, hingga akhirnya ia melanjutkan studinya di Baghdad di Universitas Al Za' fani. Selanjutnya ia mengembara ke berbagai daerah, tetapi pada akhirnya kota Baghdad dipilihnya sebagai tempat tinggal dan mengajar di sana beberapa tahun.

Di kota ini pula ia menghabiskan waktunya untuk menulis sejumlah buku dalam berbagai bidang. Selain mendapat pendidikan di perguruan tinggi, ia masih belum merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya, ia kemudian mempelajari berbagai disiplin keilmuan dari beberapa ulama terkemuka di Baghdad khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Di antara gurunya ialah al-Hasan ibn Ali al-Hambali, Ja'far ibn Muhammad ibn al-Fadhl al-Baghdadi, dan Abu Hamid al-Isfahani. Sebagaimana diketahui bahwa dunia Islam di masa lalu banyak menghasilkan tokoh dan pemikir-pemikir besar yang nama dan karyanya sampai sekarang masih dipakai dan dijadikan rujukan dalam menghadapi berbagai situasi dan persoalan yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Islam. Khazanah intelektual Islam era kekhalifahan Abbasiyah pernah mengukir sejarah emas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran keagamaan. Salah satu tokoh terkemuka sekaligus pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam penyangga kemajuan Abbasiyah itu ialah Al-Mawardi.

Imam Al-Mawardi adalah seorang ahli fiqh khususnya berkaitan dengan fiqh siyasi dan termasuk salah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. Beberapa penelitian tentang pemikiran politik imam Al-Mawardi yang menjelaskan bahwa pendekatan institusional menjadi penting dalam menjalankan Negara, setiap lembaga Negara memiliki fungsi kelembagaan yang terstruktur. Negara dan agama tidak dapat dipisahkan, karena agama menunjukkan moralitas pemimpin Negara. Sehingga nilai-nilai agama tercermin dalam Negara, artinya nilai-nilai agama tercermin dalam pelaksanaan Negara seperti nilai keadilan, keamanan, kesejahteraan, jaminan hidup dan pimpinan yang berkarismatik.

Imam Al-Mawardi dikenal sebagai seorang ahli dalam ilmu pemerintahan dan hukum Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah "Al-Ahkam As-Sultaniyyah" (Hukum-hukum Kepemerintahan), di mana dia membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan dan sistem politik dalam Islam. Dalam pandangan Al-Mawardi, pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan menjunjung tinggi keadilan. Dia mengakui pentingnya konsultasi (syura) dalam pengambilan keputusan politik dan menekankan perlunya keterlibatan umat dalam urusan publik. Namun, tidak ada rujukan khusus mengenai sistem perwakilan dalam karyanya yang terkenal. Pemikiran politik Al-Mawardi lebih berfokus pada pentingnya otoritas dan keadilan dalam pemerintahan. Dia memandang otoritas politik sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan dijalankan dengan keadilan. Selain itu, dia membahas tentang tugas dan tanggung jawab penguasa, hak-hak rakyat, dan pentingnya menegakkan hukum dalam memelihara ketertiban sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menjelaskan metode yang akan digunakan terkait konsep muakha dalam tinjauan etika politik Islam. Penelitian ini menggunakan penulisan Library Research (studi kepustakaan), yaitu mengumpulkan data yang relevan dengan mengidentifikasi dan mencermati data yang terdapat dalam kepesutakaan yang berkaitan dengan topik penelitian seperti analisis jurnal, buku, dan website di internet, serta menjelaskan dengan detail semua poin-poin tersebut. Sehingga bagaimana jurnal ini dapat dipahami oleh pembaca jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan etika politik Islam menurut al-Mawardi dalam konteks modern

Al-Mawardi hidup tatkala kondisi sosial politik Dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Pada saat itu, kehidupan mewah dan hedonis berkembang luas di kalangan pemimpin umat Islam. Hal ini terlihat dengan jelas dalam acara-acara resepsi pernikahan, pakaian dinas kenegaraan, dan kehidupan pribadi mereka. Disintegrasi ini diakibatkan hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan diri sendiri, fatanisme dan persaingan mazhab, namun al-Mawardi pandai menguasai situasi dan mampu memainkan perannya dengan baik, sehingga mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum Mazhab Syafi'i, ia pernah menjadi hakim di berbagai kota. Sikapnya yang moderat, tercermin dalam perilaku dan juga dalam tulisan-tulisannya tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Umawiyah dan Abbasiyah. Sedangkan sikapnya yang tegas dan berani, tampak ketika ia menolak setiap gelar yang diberikan kepada seorang sultan yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Sebagai seorang ilmuwan, al-Mawardi merupakan sosok intelektual Muslim yang tidak puas hanya mengikuti mazhab pemikiran tertentu yang berkembang pada masanya, bila mazhab pemikiran tersebut ternyata kurang memuaskan atau bertentangan dengan logika pemikiran pribadinya. Semangat kebebasan intelektual ini mendorong al-Mawardi dalam beberapa hal berbeda dengan pemikiran-pemikiran Sunni yang lain, yang kaku dalam memegang prinsip-prinsip mazhab yang dianutnya. Awal kemunduran politik di dunia Islam pada masa Mawardi, yakni menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih baik dari masa al-Farabi, dan bahkan lebih parah..

Perkembangan Islam pada masa Rasulullah Saw melalui dua periode yang dipisahkan oleh hijrahnya beliau dan kaum Muslimin dari Makkah ke Yasrib (Madinah). Periode pertama dinamakan periode Makkah, yaitu suatu periode yang ditandai dengan munculnya benih masyarakat dan peletakan dasar-nasar Islam yang fundamental. Periode yang kedua disebut periode Madinah, yaitu suatu tahapan penyempurnaan pembentukan masyarakat Islam serta penjelasan segala sesuatu yang pada era sebelumnya masih bersifat global, dan penyempurnaan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam bentuk aktualisasi. Maka pada periode kedua inilah nampak masyarakat Islam sebagai suatu unit (kesatuan) yang bergerak menuju kepada suatu tujuan. Rangkaian kehidupan di Madinah dimulai dengan menyatukan para Muhajirin (penduduk Muslim Makkah yang hijrah) dengan kaum anshar (penduduk Asli Madinah) dalam satu ikatan persaudaraan.

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil kepermukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatis kaitannya dengan konsep/sistem kemasayarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya Negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya merekapun saling membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan. Terlepas dari idealitas gagasannya, pemikir ini terus menerus mendapat sorotan dan kritikan publik, Ia diasumsikan tidak memiliki tawaran sistem politik atau garis-garis besar aturan pemerintahan yang komprehensif, melainkan sekedar membuat gambaran ideal moral bagi para penguasa dan kekuasaannya.

Upaya mewujudkan masyarakat ideal seperti diinginkan dalam konsep masyarakat

madani modern, diperlukan berbagai instrumen pendukung dalam rangka mewujudkan harmonisasi sistem hukum yang dipraktekkan oleh masyarakat majemuk. Dengan kata lain, ideologi pluralisme hukum dianggap relevan dalam upaya mengurangi dominasi hukum negara (sentralistik) sekaligus mengakui keberadaan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk. Jika dipantulkan dengan keadaan negara Indonesia yang majemuk, pluralisme hukum justru sejalan dengan prinsip konstitusi atau kebhinekaan.

Kelanjutan dari pendekatan pluralisme hukum, secara teknis, perubahan sejumlah regulasi yang memuat aturan hukum bersifat sentralistik perlu ditinjau kembali sejalan dengan prinsip pluralisme hukum. Meskipun demikian tidak semua regulasi yang sudah ada dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pluralisme. Akan tetapi diperlukan upaya untuk mengidentifikasi kembali sejumlah regulasi yang ada dan yang akan dirumuskan oleh penguasa atau negara, dipastikan mengakomodir keragaman sistem hukum yang ada dalam masyarakat

Terciptanya masyarakat madani merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus bersinergi dan bekerja sama sebagai mitra dalam membangun masyarakat yang ideal. Namun, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat terlaksana apabila ada nilai kepercayaan di antara keduanya. membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah prasyarat utama terciptanya masyarakat madani yang penuh damai dan demokratis. Peran pemerintah sangat penting dalam terciptanya masyarakat madani. Masyarakat madani yang diciptakan oleh Nabi Muhammad saw. ketika berada di Madinah sebagai pemimpin negara memiliki ciri-ciri di atas. Hal ini tercermin dari butir-butir Piagam Madinah yang ia tetapkan sebagai konstitusi Madinah.

Masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didasarkan pada agama sebagai sumber moral, inspirasi, dan aksi dalam tatanan kehidupan masyarakat, serta menjunjung kebersamaan sosial untuk hidup secara damai, demokratis, dan toleran, bukan didasarkan pada kepentingan kelompok atau pribadi, sehingga terwujud masyarakat yang etis, egaliter, dan berbudaya. Begitu juga masyarakat Kampung Sawah; sejak ratusan tahun lalu telah hidup rukun lintas agama, terbiasa dengan perbedaan agama dan terbiasa pula menghormatinya.

Etika Politik dalam Sistem Politik Madani Konsep masyarakat madani yang modern dapat dikatakan seirama dengan etika politik Islam dan demokrasi masyarakat menghendaki:

- a. Legislatif benar berfungsi sebagai pemikir dan perumus kepentingan rakyat serta berupaya maksimal untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.
- b. Yudikatif yang jujur, adil, terpercaya dan mampu membuat atau menjatuhkan sanksi yang adil terhadap siapapun tanpa memandang jabatan yang diemban.
- c. Eksekutif yang fungsional, bersih, jujur dalam melaksanakan mandat rakyat. d. Masyarakat harus jujur dan berani berkata benar dalam menyampaikan tuntutan dan kewajiban taat pada berbagai aturan yang memberikan kemungkinan untuk mensejahterakan masyarakat.

Etika politik Islam modern menurut al-Mawardi terdiri dari prinsip-prinsip dan pedoman moral yang mengatur tindakan politik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan hubungan antara negara dan Masyarakat. Beberapa ide utama tentang etika politik Islam kontemporer termasuk:

- a. Tauhid: Basis etika politik Islam terdiri dari prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan. Prinsip ini menekankan bahwa Allah adalah sumber semua kekuasaan dan otoritas, dan para pemimpin politik bertanggung jawab untuk

- mengemban amanah (amanat) tersebut dengan berpegang pada nilai-nilai etika Islam.
- b. Keadilan: Dalam etika politik Islam, keadilan merupakan prinsip yang sangat penting. Pemerintahan yang adil, perlakuan yang setara, dan penegakan hukum yang adil dijaga.
 - c. Syura : Dalam etika politik Islam, konsep musyawarah, atau syura, sangat penting. Ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan pemimpin harus mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan penting.
 - d. Amanah: Dalam etika politik Islam, prinsip amanah menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab. Diharapkan pemimpin politik bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan menghindari korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.
 - e. Kemaslahatan Umum: Dalam etika politik Islam, kemaslahatan umum (masalah) adalah tujuan utama kebijakan politik. Keputusan politik harus dibuat demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
 - f. Hak dan martabat manusia: Etika politik Islam mengakui martabat manusia dan hak asasi mereka. Pemerintah harus menghormati dan melindungi hak setiap orang.

Imam al-Mawardi membangun teori politiknya selalu berdasarkan realitas politik pada zamannya. Demikian pula pandangan al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara juga tampak penerapannya di Indonesia meskipun pada proses pelaksanaannya memperlihatkan pengembangan yang bersifat teknis. Misalnya teori kontrak sosial, Imam al-Mawardi sangat sederhana menjelaskan hubungan antara ahl al-Aqdi wa al-Halli atau ahl al-Ikhtiar dan imam atau kepala negara sebagai dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian namun pada penerapannya di Indonesia, lembaga ini sama dengan lembaga DPR/MPR.

Strategi membangun Masyarakat madani modern di Indonesia dapat dilakukan dengan integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik, melalui masyarakat sipil yang mengejewantah dalam berbagai wadah sosial politik di masyarakat, seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi komunitas, media dan lembaga pendidikan, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, maka peran umat Islam amat menentukan dalam artian memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan tatanan yang kondusif.

Selain itu, dibutuhkan perjuangan yang gigih secara terus menerus. serta membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya masyarakat madani yang modern, seperti kerja sama yang baik antara pemerintah dengan lembaga masyarakat, serta dengan masyarakat. Alasan dan tujuan agar terciptanya masyarakat madani adalah agar segala macam bentuk kemajuan dan pembangunan dimasyarakat dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perwujudan masyarakat madani modern harus mempertimbangkan setidaknya dua hal utama, yaitu legitimasi negara dan terciptanya masyarakat mandiri yang berpijak di atas fondasi moral yang kokoh.

Perangkat yang dibutuhkan dalam membangun masyarakat madani modern, adalah meliputi amal saleh (perbuatan), keterbukaan berpendapat, kebersamaan, dan benar-benar adil dalam bertindak, demokratis berdasarkan prinsip musyawarah. Dalam proses musyawarah akan melahirkan hubungan sosial yang harmonis yang diilhami oleh semangat kebersamaan, saling membantu maupun mengakui keaneka ragaman baik berkaitan dengan perbedaan suku, bangsa, agama dan lainnya. Bagi masyarakat modern mengakui keaneka ragaman merupakan modal utama dalam membangun masyarakat madani dan merupakan tuntunan mendasar dalam membangun masyarakat madani yang didalamnya dihiasi dengan nilai-nilai Islam.

5 unsur terbentuknya masyarakat madani yang modern:

1. Pluralistik: Pluralisme mengacu pada keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan

- masyarakat, seperti agama, budaya, suku, dan pandangan politik. Pentingnya
2. pluralisme adalah menciptakan ruang bagi berbagai kelompok dan individu dengan latar belakang yang berbeda untuk hidup berdampingan secara harmonis. Pluralisme memungkinkan adanya dialog, pemahaman, dan kerjasama antara beragam kelompok dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkaya budaya, mempromosikan persatuan, dan mencegah konflik.
 3. Saling pengertian: Sikap saling pengertian antara anggota masyarakat adalah landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Saling pengertian memungkinkan adanya empati, toleransi, dan rasa hormat terhadap pandangan, kebutuhan, dan hak-hak individu dan kelompok lain. Dengan saling pengertian, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
 4. Toleransi tinggi: Toleransi tinggi mengacu pada kemampuan individu dan masyarakat untuk menerima perbedaan dan menghormati hak-hak asasi setiap individu. Pentingnya toleransi tinggi adalah menciptakan iklim sosial yang aman, di mana setiap orang merasa dihargai dan diakui. Toleransi tinggi memungkinkan adanya kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Toleransi tinggi juga mempromosikan kerukunan antaragama, kerjasama lintas budaya, dan pembangunan masyarakat yang adil dan inklusif.
 5. Memiliki sanksi moral: Memiliki sanksi moral berarti masyarakat memiliki norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, serta adanya mekanisme penegakan dan penghormatan terhadap nilai-nilai tersebut. Sanksi moral melibatkan tanggung jawab individu dan kesadaran akan konsekuensi moral dari tindakan mereka. Pentingnya memiliki sanksi moral adalah menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab, jujur, adil, dan menghormati hak-hak orang lain. Sanksi moral juga berfungsi sebagai panduan bagi perilaku yang baik dan mendorong pembentukan sikap dan perilaku yang positif dalam masyarakat.

Karakteristik masyarakat madani yang modern dapat mencakup beberapa aspek berikut:

1. Keterbukaan dan Kebebasan Berpendapat: Masyarakat madani yang modern ditandai oleh keterbukaan dalam mengakses informasi dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan berkontribusi dalam pembentukan opini publik.
2. Demokrasi dan Partisipasi Aktif: Masyarakat madani yang modern mendorong partisipasi aktif dari warganya dalam kehidupan politik dan sosial. Sistem demokrasi memberikan ruang bagi warga untuk memilih perwakilan mereka, terlibat dalam pemilihan umum, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya.
3. Toleransi dan Heterogenitas: Masyarakat madani yang modern menghargai keberagaman dan mengedepankan prinsip toleransi. Warga berinteraksi secara harmonis tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau latar belakang budaya. Penghormatan terhadap pluralisme menjadi salah satu karakteristik penting dalam masyarakat madani yang modern.
4. Keadilan Sosial dan Kesejahteraan: Masyarakat madani yang modern berupaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Terdapat perhatian yang kuat terhadap penghapusan kesenjangan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Masyarakat madani yang modern menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan dan institusi publik. Terdapat mekanisme

yang memastikan akuntabilitas dan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan publik, penggunaan anggaran negara, dan tindakan institusi terkait.

Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan kepribadian. Kepribadian individu dan kepribadian masyarakat dalam tatanan masyarakat madani modern perlu dilakukan hingga pemberdayaan segi kepribadian ini akan lebih terfokus. Salah satunya kita dapat menggunakan sandaran kepribadian sehat model Maslow (tokoh psikologi humanistik) yang memberikan simbol the self actualizing person dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Persepsi obyektif
2. Penerimaan secara utuh akan dirinya, orang lain maupun lingkungan hidup
3. Spontan, sederhana dan alamiah (tidak berpura-pura)
4. Menyintai pekerjaan
5. Mandiri dan Merdeka
6. Memiliki apresiasi terhadap dunia sekitarnya
7. Memiliki rasa humor yang cerdas
8. Minat sosial yang tinggi
9. Menjalin hubungan interpersonal yang sehat
10. Kreatif
11. Demokratis

Merujuk dari hal di atas, kembali lagi pada pembahasan awal, yakni pendapat al-Mawardi yang mengatakan bahwa seharusnya negara berdasarkan agama agar supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara itu berada di bawah naungan pengawasan Tuhan. Negara dalam konsepsi pemikiran Islam klasik mengintegrasikan negara ke dalam agama. Negara tidak bisa lepas dari persoalan agama baik di zaman dahulu hingga di zaman modern seperti sekarang, Agama adalah aspek yang tidak dapat dihilangkan

Sehingga dapat diketahui bahwa kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak dan budi pekerti al-Mawardi membuat beliau sangat terkenal sebagai panutan yang disegani dan berwibawa pada masanya dan di masa sekarang yang sudah modern, baik di masyarakat umum maupun pemerintahan. Ia juga merupakan tokoh terkemuka dalam madzhab Syafi’I, al-Mawardi yang bermazhab Syafi’I berpikiran agak “longgar”, dalam arti banyak terkungkung oleh pemerintahan dan situasi umat yang mayoritas menganut mazhab tersebut, meskipun teori-teori yang dikemukakan juga sangat tegas dan sarat dengan persyaratan-persyaratan yang mencerminkan kepada pentingnya keadilan, sehingga beliau berkali-kali memegang jabatan hakim di Baghdad dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya di masa pemerintahan Abbasiyah.

2. Dampak penerapan etika politik Islam menurut al-Mawardi bagi Masyarakat modern

Konsep Masyarakat Madani menurut slam adalah bangunan politik yang: demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti: kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ciri utama Masyarakat Madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai faham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Manfaat Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya Masyarakat Madani ialah terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Di samping itu, dengan terwujudnya Masyarakat Madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti: konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, dan kesenjangan sosial.

Kemajuan zaman modern membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif yang mendominasi. Kemajuan yang telah merambah berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu sosial, ekonomi, budaya dan politik, menuntut individu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat dan aman. Simbol-

simbol zaman modern yang ditampilkan oleh peradaban perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi dan perubahan lingkungan yang cepat telah menciptakan kesenjangan antara manusia dengan lingkungan sosialnya

Hal lain yang perlu diketahui bahwa dalam proses mewujudkan masyarakat madani yang modern dibutuhkan perjuangan yang gigih secara terus menerus. Ia juga membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya masyarakat madani, seperti kerja sama yang baik antara pemerintah dengan lembaga masyarakat, serta dengan masyarakat.

Konsep masyarakat madani modern berkembang belakangan sebagai padanan dari masyarakat sipil. Etika politik Islam menjadi lebih populer karena didukung oleh Soeharto pada eranya yang ingin melakukan perubahan politik secara modern dengan hati-hati dengan mengurangi keterlibatan ABRI dalam jabatan sipil atas desakan negara-negara donor dengan berakhirnya perang dingin pada tahun 1989. Bagi regim Orde Baru, istilah masyarakat madani lebih netral karena tidak seperti halnya konsep civil society yang ingin mendesak ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang terjadi di USA. Konsep masyarakat madani kemudian dikembangkan untuk menggantikan paradigma lama yang menekankan pada stabilitas dan keamanan yang terbukti sudah tidak cocok lagi di era tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat madani modern membangun manusia yang bermoral dan beradab dengan membangun kualitas bangsa. Hal tersebut telah disepakati bahwa proses pembangunan suatu bangsa sangat bergantung terhadap sumber daya manusia yang ada, suatu bangsa akan menjadi besar apabila bangsa itu percaya pada sesuatu, dan sesuatu itu harus berdimensi moral. Misalnya pada bidang Pendidikan Islam, yang mana hal tersebut diibaratkan sebagai 'mesin' yang seharusnya bisa bekerja dengan baik sesuai standar yang telah ditentukan sehingga dapat berhasil.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan dalam masyarakat madani adalah pendidikan sebagai sarana bagi manusia mencapai kehidupan yang makmur, adil, sejahtera dan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Pendidikan berfungsi memperbaiki, mengontrol dan menuntun pada jalan yang benar, mengembangkan dan mengasah bakat individu-individu dalam masyarakat, sekaligus membentuk karakter kepribadian anggota masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Meskipun, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspek. Pengembangan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-potong atau tidak komprehensif. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja.

Masyarakat madani dimasa modern juga mengajarkan hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka dan transparan.

Adapun 5 hal penunjang hal tersebut yaitu:

1. Partisipasi rakyat
2. Otonom
3. Tidak bebas nilai
4. Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan
5. Terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat.
6. Masyarakat madani yang modern memiliki peran dan sikap yang penting terhadap

kekuasaan kehakiman. Masyarakat madani adalah masyarakat yang aktif, partisipatif, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjelaskan bagaimana masyarakat madani berinteraksi dengan kekuasaan kehakiman:

1. Penghormatan terhadap keputusan pengadilan: Masyarakat madani harus menghormati dan mengakui keputusan yang diambil oleh kekuasaan kehakiman. Mereka percaya bahwa keputusan pengadilan merupakan hasil dari proses yang adil dan objektif.
2. Partisipasi dalam sistem peradilan: Masyarakat madani secara aktif terlibat dalam sistem peradilan, baik sebagai peserta dalam proses pengadilan maupun melalui partisipasi dalam pemilihan hakim. Mereka berperan dalam memberikan bukti, memberikan kesaksian, atau memperjuangkan keadilan.
3. Pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman: Masyarakat madani memiliki peran penting dalam mengawasi dan memantau kinerja kekuasaan kehakiman. Mereka dapat melaporkan perilaku yang tidak etis atau penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim, serta mengadvokasi reformasi peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.
4. Pendidikan hukum dan kesadaran hukum: Masyarakat madani memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan proses peradilan. Mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan memahami hak-hak mereka serta tanggung jawab dalam sistem peradilan.
5. Mendorong akses keadilan bagi semua: Masyarakat madani berkomitmen untuk memastikan akses keadilan yang adil dan setara bagi semua lapisan masyarakat. Mereka mendorong keberagaman dan inklusivitas dalam sistem peradilan, serta melawan diskriminasi dan ketidakadilan.
6. Menghormati independensi kehakiman: Masyarakat madani menghormati prinsip independensi kehakiman. Mereka mendukung upaya untuk menjaga kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain.

Dengan demikian, masyarakat madani memberikan kontribusi penting dalam memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman, serta memperjuangkan keadilan dan supremasi hukum dalam suatu negara.

Penerapan etika politik pada masa modern dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap paradigma keadilan dalam hukum negara berdasarkan teori kebenaran dari perspektif filsafat hukum Islam. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. Peningkatan Keadilan Substantif: Etika politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dapat mempengaruhi penegakan hukum negara agar lebih mementingkan keadilan substantif. Dalam konteks filsafat hukum Islam, etika politik yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dapat mendorong penerapan hukum yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara adil.
2. Penguatan Nilai Kebenaran: Penerapan etika politik yang berlandaskan pada kebenaran sebagai nilai utama dalam penegakan hukum dapat memberikan pengaruh positif terhadap paradigma keadilan. Dalam konteks filsafat hukum Islam, kebenaran yang mencerminkan tujuan hukum Islam dapat menjadi landasan dalam menentukan keadilan dalam penegakan hukum negara.
3. Penghindaran Diskriminasi dan Ketimpangan: Etika politik yang menjunjung tinggi keadilan dapat membantu menghindari diskriminasi dan ketimpangan dalam penegakan hukum. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dapat mendorong penegakan hukum yang adil tanpa membedakan agama, ras, gender, atau status sosial.
4. Penguatan Legitimasi Hukum: Penerapan etika politik yang berorientasi pada keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dapat meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika hukum diterapkan secara adil dan berlandaskan pada nilai-nilai

kebenaran, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem hukum negara.

Masyarakat modern dapat dimaknai sebagai salah satu jenis dan bentuk manusia yang kehilangan visi ke-ilahian dan mengalami kekosongan spiritual, karena ia tidak menyadari kedudukannya sebagai jembatan langit dan bumi. Manusia modern adalah manusia yang menderita penyakit amnesia, pelupa, karena pemberontakannya terhadap realitas surgawi. Akibatnya ia jatuh ke dalam jurang kekosongan atau kehampaan spiritual sehingga melakukan sesuatu terhadap alam tanpa bisa menyadari bahwa polusi lingkungan hidup adalah akrobat polusi jiwa.

Dengan demikian, penerapan etika politik yang memperhatikan paradigma keadilan dalam hukum negara berdasarkan teori kebenaran dari perspektif filsafat hukum Islam dapat memberikan dasar yang kuat untuk membangun sistem hukum yang adil, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi perlindungan hak-hak individu dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara.

Penerapan etika politik Islam memiliki beberapa dampak bagi masyarakat modern. Al-Mawardi mengemukakan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh penguasa Muslim dalam menjalankan tugas politik mereka. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:

1. Keadilan: Salah satu prinsip utama dalam etika politik Islam yang ditekankan oleh Al-Mawardi adalah keadilan. Penerapan etika politik Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat modern. Dalam konteks politik, keadilan dapat mencakup perlakuan adil terhadap semua warga negara, penegakan hukum yang berkeadilan, serta distribusi sumber daya yang merata.
2. Pemberantasan Korupsi: Al-Mawardi juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dalam etika politik Islam. Penerapan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat membantu mengurangi tingkat korupsi di dalam masyarakat modern. Dampaknya adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.
3. Kesejahteraan Sosial: Etika politik Islam juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan dan perhatian terhadap kaum miskin, dapat membawa dampak positif bagi masyarakat modern. Dengan adanya perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan sosial, diharapkan kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan.
4. Partisipasi Masyarakat: Etika politik Islam juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dampaknya adalah terciptanya masyarakat yang lebih terlibat dalam perumusan kebijakan publik dan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memperkuat hubungan antara penguasa dan rakyat.

Penerapan etika politik Islam menurut Al-Mawardi dapat memiliki beberapa dampak terhadap kewarganegaraan dan masyarakat madani dalam konteks masyarakat modern. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul:

1. Penguatan Kewarganegaraan: Etika politik Islam menekankan pentingnya kewajiban dan tanggung jawab warga negara terhadap negara dan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab, menginspirasi partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan sosial dan politik, serta memperkuat ikatan antara individu dan komunitasnya.

2. Keadilan dan Kesetaraan: Etika politik Islam menurut Al-Mawardi menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat madani modern, penerapan prinsip-prinsip ini dapat berdampak pada penghapusan diskriminasi, perlindungan hak-hak minoritas, dan pembangunan sosial yang inklusif.
3. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Etika politik Islam menurut Al-Mawardi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat masyarakat madani dengan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam proses demokrasi, termasuk pemilihan umum, konsultasi publik, dan advokasi masyarakat sipil.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Etika politik Islam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan politik dan pemerintahan. Dalam konteks masyarakat madani modern, penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat tata kelola yang baik, meminimalkan korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pemerintahan.
5. Pemeliharaan Nilai-Nilai Moral: Etika politik Islam menurut Al-Mawardi menekankan pentingnya pemeliharaan nilai-nilai moral dalam kehidupan politik dan sosial. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat integritas dan tanggung jawab moral dalam tindakan politik, serta mempromosikan kehidupan beradab, kejujuran, dan kebaikan dalam masyarakat madani.

Perlu dicatat bahwa dampak penerapan etika politik Islam menurut Al-Mawardi pada kewarganegaraan dan masyarakat madani dapat bervariasi tergantung pada interpretasi, konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Selain itu, peran dan pengaruh faktor-faktor lain dalam masyarakat juga perlu dipertimbangkan secara menyeluruh.

Penerapan etika politik Islam al-Mawardi dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mengembangkan masyarakat modern. Salah satu dampak penerapan etika politik Islam al-Mawardi adalah terciptanya tata pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Etika politik yang diajarkan oleh al-Mawardi menekankan pentingnya pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam mengelola urusan publik. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan terciptanya sistem politik yang transparan, di mana rakyat memiliki akses yang adil terhadap keadilan dan pelayanan publik.

Selain itu, penerapan etika politik Islam al-Mawardi juga dapat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern. Etika politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kesejahteraan umum, dapat mendorong pemerintahan untuk mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, juga dapat mempengaruhi moral dan nilai-nilai dalam masyarakat modern.

Prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh al-Mawardi, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial, dapat membentuk karakter dan perilaku individu dalam masyarakat. Dengan adanya penerapan etika politik Islam yang kuat, diharapkan masyarakat modern dapat mengembangkan kesadaran moral yang lebih tinggi dan menghargai nilai-nilai yang positif dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, penting untuk diingat bahwa dampak penerapan etika politik Islam al-Mawardi dalam mengembangkan masyarakat modern dapat bervariasi tergantung pada konteks historis, budaya, dan politik masing-masing masyarakat. Selain itu, interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip al-Mawardi juga dapat berbeda antara satu negara

dengan negara lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap etika politik Islam al-Mawardi diperlukan untuk mengenali dampak-dampaknya yang konkret dalam mengembangkan masyarakat modern.

Terakhir, nilai-nilai dari modernisasi yang dapat diambil yaitu :

1. Paham tauhid untuk mempercayai adanya tuhan di alam semesta yang luas ini. Yang Maha Esa sehingga terbentuklah bumi dan seisinya.
2. Ajakan, anjuran, atau panggilan untuk setiap individu agar mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ada atau yang mereka lakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Tidak fanatik atau memiliki rasa kesucian jiwa lebih daripada Tuhan.

KESIMPULAN

Imam Al-Mawardi adalah seorang tokoh terkemuka dalam Mazhab Syafi'i pada abad ke-10 dan pemikir politik dalam dunia Islam. Ia memiliki pengetahuan yang luas dalam ilmu fiqh, hadis, dan ilmu pemerintahan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah "Al-Ahkam As-Sultaniyyah" yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan dan sistem politik dalam Islam. Dalam pandangan Al-Mawardi, pemerintahan yang ideal adalah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan menjunjung tinggi keadilan. Ia mengakui pentingnya konsultasi (syura) dalam pengambilan keputusan politik dan perlunya keterlibatan umat dalam urusan publik. Al-Mawardi juga menekankan pentingnya otoritas politik yang dipertanggung jawabkan dan dijalankan dengan keadilan. Namun, tidak ada rujukan khusus mengenai sistem perwakilan dalam karyanya yang terkenal. Pemikiran politik Al-Mawardi lebih berfokus pada pentingnya otoritas dan keadilan dalam pemerintahan, serta tugas dan tanggung jawab penguasa, hak-hak rakyat, dan pentingnya menegakkan hukum dalam memelihara ketertiban sosial.

Dalam konteks modern, penerapan etika politik Islam menurut Al-Mawardi dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik yang berlandaskan nilai-nilai agama, keadilan, dan partisipasi umat. Al-Mawardi juga menghadapi kondisi sosial politik yang disintegratif pada masanya dan mampu memainkan peran strategis dalam pemerintahan dengan sikap moderat dan tegas dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, pemikiran politik Al-Mawardi memberikan kontribusi penting dalam memahami prinsip-prinsip politik dan pemerintahan dalam Islam, serta relevansinya dalam konteks modern untuk menciptakan keadilan, keterlibatan umat, dan menjaga nilai-nilai agama dalam pelaksanaan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Normina, Nor Syifa, Rahmah, dan Zaymah Bubiyah, "Masyarakat Madani dalam Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 17.1 (2023), 1–17
- Amin, Muhammad, "Pemikiran Politik Al-Mawardi," *Jurnal Politik Profetik*, 4.2 (2016), 117–36 <<https://doi.org/10.24252/jpp.v4i2.2744>>
- Astuti, Ngudi, "Peran Umat Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 11.2 (2018), 87–99 <<https://doi.org/10.21009/jimd.v11i2.6262>>
- Diana, Rashda, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," *Tsaqafah*, 13.1 (2017), 157 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>>
- Dwi Lestari, Wika, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dalam Upaya Menunjang Good Governance di Kabupaten Tasikmalaya," 7.November 2015 (2019), 10–30
- Elkarimah, Mia Fitriah, "Kerukunan Antarumat Beragama di Kampung Sawah, Bekasi: Potret Masyarakat Madani," *Human Narratives*, 1.2 (2020), 55–65 <<https://doi.org/10.30998/hn.v1i2.180>>

- Hanif Fudin Azhar, “Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019, 210 <<http://repository.iainpurwokerto.ac.id>>
- Herdiawanto, Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama, “P R E N A D A M E D I A Kewarganegaraan,” 2019, 1–328
- Hukum, Kemajemukan, Dalam Bingkai, Masyarakat Madani, Dari Masa, Masa Muhammadun, □ Murjazin, et al., “Eduprof: Islamic Education Journal Volume2 Nomor 1,” 2 (2020) <<https://doi.org/10.47453/eduprof.v3i2.88>>
- Ilma, Mughniatul, dan Rifqi Nur Alfian, “Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam,” MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, 1.01 (2020), 25–46 <<https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2186>>
- IN’AMUZZAHIDIN, MUH., “Etika Politik Dalam Islam,” Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 2.2 (2016), 89 <<https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>>
- Khalik, M F, “Reposisi Agama Sebagai Sumber Spiritualitas Masyarakat Modern,” Ash-Shahabah, 2017, 1–8 <<http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/178>>
- Lailatul Mufidah, Kukuh Tejomurti, “KONSEP PEMIKIRAN POLITIK IMAM AL-MAWARDI TENTANG SISTEM PERWAKILAN,” 7.3 (2021), 6
- Mawardi, Imam, Kata Kunci, : Dimensi, Masyarakat Madani, dan Etika Sosial, “Dimensi-Dimensi Masyarakat Madani: Membangun Kultur Etika Sosial,” Cakrawala, X.2 (2015), 156–74
- Muhajir, “Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia Imam Al-Mawardi ’ s Islamic Political Thought and Its Relevance in Indonesia,” POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, X.I (2023), 83–98
- Muhammad, Nurdinah, dan Fakultas Ushuluddin, “Nurdinah Muhammad: Masyarakat Madani dalam perspektif al-Qur’an,” Al-Mu’ashirah, 14 (2017), 20–30
- Mustaniruddin, Ahmad, Hery Afriyadi, dan Jamilah Abu Bakar, “Indikator Terciptanya Masyarakat Madani Perspektif Al-Qur’an,” TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 19.2 (2021), 164–87 <<https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.127>>
- Nasution, Hambali Alman, dan Trisandi Trisandi, “Masyarakat Madani dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam (Telaah Filosofis),” Al-Fikru: Jurnal Ilmiah, 14.2 (2021), 55–65 <<https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i2.31>>
- Nasution, Saripa Haribulan, Faradiza Ariska Sitorus, dan Heni Winda Siregar, “Perkembangan Masyarakat Indonesia Tradisional,Transisi, Modern Pedesaan Dan Perkotaan,” Jurnal Pendidikan dan Riset, 1.1 (2023), 47–53 <<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami.>>
- Nursalim, Eko, “Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani di Era Globalisasi (Suatu Ikhtiar Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean/MEA),” At-Turats, 10.1 (2016), 53 <<https://doi.org/10.24260/at-turats.v10i1.482>>
- Pimay, Awaludin, dan Fania Mutiara Savitri, “Dinamika dakwah Islam di era modern,” Jurnal Ilmu Dakwah, 41.1 (2021), 43–55 <<https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>>
- Rahmawati, Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 16.2 (2018), 264–83 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.621>>
- Rochmat, Saefur, “Dosen Jurusan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta 1,” 1999, 1–20
- Rosyada, Rosyada, “Membangun Ketangguhan Keluarga Dalam Menciptakan Masyarakat Yang Madani,” Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies, 3.2 (2023), 102 <<https://doi.org/10.24042/jwcs.v3i2.19217>>
- Sukmana, Rifky Adji, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan, “Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam,” JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora, 8.2 (2023), 17–32 <<https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>>
- Suroto, “Konsep Masyarakat Madani Dii Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analitis Kritis),” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5.9 (2015), 121296 <<https://www.neliti.com/publications/121296/>>
- Syam, Syafruddin, “Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia,” Al-Hadi, 2.2 (2017), 485–98 <<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/156/138>>

Taimiyyah, D A N I B N, “Ihsan,+4.+Supian,” 3.2, 227–50
Wajdi Ibrahim, Farid, “Pembentukan Masyarakat Madani Di Indonesia Melalui Civic Education,”
Jurnal Ilmiah Didaktika, 13.1 (2012), 130–49 <<https://doi.org/10.22373/jid.v13i1.469>>
Yusdani, “PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG RELASI AGAMA ISLAM DAN NEGARA
SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS INDONESIA Sudirwan Pembimbing:
Dr. Drs Yusdani, M.Ag,” 2019, 1–33 <http://hdl.handle.net/123456789/17800>.